



Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia modern telah memberikan dampak perubahan yang sangat besar dimana pengetahuan menjadi unsur utama dalam inovasi sehingga memberi nilai tambah dalam meningkatkan kinerja Pelayanan Publik, produktivitas masyarakat dan sebagai aplikasi kebijakan untuk efisiensi serta peningkatan daya saing.

Pengaturan kebijakan inovasi dimaksudkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi melalui bidang Pengkajian peraturan pada tahun 2019 mengajukan rancangan Peraturan daerah mengenai Pembinaan

inovasi sebagai wujud pelaksanaan PP Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi daerah dan UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Kepala Balitbangda Provinsi Jambi (Ir. Azrin, M.Si) dan berkolaborasi dengan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi (DRD).